

Judul : DPR Sebut masih banyak sekolah rusak, pemerintah diminta utamakan revitalisasi sarana pendidikan
Tanggal : Selasa, 28 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Sebut Masih Banyak Sekolah Rusak Pemerintah Diminta Utamakan Revitalisasi Sarana Pendidikan

Senayan mendorong Pemerintah segera menyusun peta jalan revitalisasi sarana serta prasarana pendidikan secara nasional. Perencanaan yang terukur dan berkelanjutan merupakan kunci utama mempercepat perbaikan sekolah rusak.

ANGGOTA Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan, masih banyak unit sekolah rusak belum tersentuh dana revitalisasi. Padahal, Pemerintah sebenarnya sudah memiliki basis data memadai melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Data itu memuat seluruh informasi mengenai kondisi fisik bangunan sekolah, tenaga pendidik, hingga kebutuhan pendidikan di setiap satuan. Harusnya, itu bisa jadi dasar penyusunan kebijakan. "Pemerintah harus menjadikan Dapodik sebagai acuan utama penyusunan anggaran serta pengalokasian dana revitalisasi sekolah," terangnya, Jumat (24/7/2026).

Jika anggaran masih terbatas, Nur mengusulkan agar Pemerintah menerapkan skala prioritas melalui klasterisasi tingkat kerusakan sekolah. Penanganan sekolah dengan kategori rusak berat harus didahulukan dibanding lainnya. Setelah itu, perbaikan baru disusul untuk sekolah yang mengalami kerusakan sedang maupun rusak ringan.

Negara, kata dia, tidak boleh menunggu hingga kondisi fisik bangunan sekolah semakin parah sebelum melakukan perbaikan. Keterlambatan penanganan berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik sekaligus meningkatkan biaya rehabilitasi. "Saat Dapodik mencatat ada keru-

sakan, Pemerintah wajib hadir tanpa menunggu bangunan sekolah jadi rusak berat," tegasnya.

Dia bilang, kebutuhan revitalisasi sarana fisik sekolah di Indonesia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran. DPR dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkirakan kebutuhan nasional mencapai Rp 560 triliun. Sementara alokasi anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp 14,7 triliun.

Nilai anggaran itu memang belum mampu memenuhi kebutuhan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Kondisi itu juga menunjukkan bahwa persoalan kerusakan fasilitas sekolah masih jadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah. "Masalah infrastruktur ini harus segera diselesaikan secara menyeluruh," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati menambahkan, Pemerintah harus menyusun mekanisme revitalisasi sekolah yang lebih transparan dan terintegrasi. Saat ini program berjalan melalui jalur Kemendikdasmen serta Sekretariat Negara. Dua jalur pendanaan berbeda itu membuat banyak sekolah kesulitan memanfaatkan perkembangan usulannya.

Mekanisme pengusulan yang berada di bawah Direktorat Jen-



Muhamad Nur Purnamasidi

deral Dikdasmen relatif lebih mudah dipantau pihak sekolah. Karena sekolah bisa mengetahui tiap tahapan yang dilalui secara jelas. Tahapan itu dimulai dari proses pembahasan, penandatanganan kerja sama, hingga pelaksanaan pembangunan gedung.

Sebaliknya, usulan revitalisasi yang diproses melalui jalur lain belum memberikan informasi yang memadai kepada pihak sekolah. Akibatnya pihak sekolah sering kali tidak memperoleh kepastian mengenai perkembangan usulan yang telah diajukan. "Ketidakpastian informasi ini tentu sangat menghambat persiapan pelaksanaan," katanya.

Kondisi itu, sambung Esti, berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan kepala sekolah maupun masyarakat. Pasalnya, sejumlah pihak sekolah mengaku sudah masuk dalam daftar usulan revitalisasi, tapi belum mengetahui kepastian waktu pelaksanaannya. Hal semacam ini harus segera diperbaiki Pemerintah agar tidak memicu kebingungan publik.

Komisi X DPR meminta Pemerintah segera melakukan sinkronisasi terhadap seluruh mekanisme pelaksanaan revitalisasi sekolah di daerah. Langkah terpadu ini bertujuan agar seluruh proses pembangunan dapat dipantau secara terbuka oleh publik. "Pemantauan itu mencakup tahap pengusulan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, hingga pelaksanaan pembangunan," terangnya.

Dia bilang, keterbukaan informasi publik merupakan unsur utama pengawasan dalam penggunaan dana dan anggaran negara. Lewat sistem pengerjaan yang lebih terintegrasi, pihak sekolah tidak hanya memperoleh kepastian mengenai usulannya. Selain itu, sekolah juga bisa mempersiapkan pelaksanaan program perbaikan sarana secara lebih baik dan matang.

Dia meminta Pemerintah segera menyempurnakan sistem pelaksanaan revitalisasi sekolah agar seluruh pemangku kepentingan memiliki akses informasi yang sama. Program harus berjalan akuntabel, tepat sasaran, serta menjawab kebutuhan daerah. "Sehingga kualitas sarana pendidikan bisa terus ditingkatkan secara merata di seluruh Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya, Kemendikdasmen menyatakan program prioritas revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 menggunakan pola swakelola atau partisipasi penuh masyarakat. Langkah strategis ini diambil guna memangkas birokrasi serta menghemat anggaran. Skema baru itu juga menutup rapat celah praktik KKN yang rentan terjadi pada proyek kontraktual.

Widyapra Ahli Utama Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen Khamim menjelaskan, mekanisme swakelola merupakan wujud instruksi Presiden Prabowo Subianto. Program prioritas ini menargetkan percepatan perbaikan infrastruktur sekolah secara masif tanpa hambatan birokrasi. Nantinya, dana bantuan akan dikirimkan langsung ke rekening sekolah penerima manfaat.

Melalui skema terbaru ini, dana bantuan Pemerintah senilai belasan triliun rupiah disalurkan langsung ke rekening sekolah dalam dua tahapan. Pengerjaan perbaikan tidak lagi diserahkan kepada kontraktor. "Proyek dikelola mandiri oleh panitia pembangunan sekolah yang melibatkan komite, wali murid, dan warga setempat," jelasnya.

Penerapan sistem swakelola ini dipastikan tidak membebani para guru sehingga mereka tetap dapat fokus mengajar. Mekanisme ini juga efektif menutup peluang kebocoran dana karena tidak perlu membayar biaya kontraktor. Pendekatan itu menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja di pedesaan.

Program ini tidak sekadar menyulap sarana belajar jadi layak. Kegiatan fisik konstruksi bernilai Rp13,5 triliun ini juga diyakini menghadirkan efek ganda bagi ekonomi rakyat. "Kemendikdasmen memproyeksikan program padat karya itu mampu mendorong perputaran roda ekonomi secara signifikan di berbagai wilayah Indonesia," pungkasnya. ■ PVB